

**PENGARUH INDIKATOR NONKEUANGAN
DAN KEUANGAN TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN
(KOMPARASI EMPIRIS: INDONESIA, VIETNAM, DAN MALAYSIA)**

Didi Achjari

Fakultas Ekonomika & Bisnis UGM Yogyakarta
e-mail:dachjari@yahoo.com Hp: 08157910480

Sri Suryaningsum

Fakultas Ekonomi UPN Veteran Yogyakarta
e-mail: suryaningsumsri@yahoo.com Hp: 085729671807

ABSTRACT

The effect of indicators non-financial and financial Implementation has been interesting topics in Indonesia, Malaysia, and Vietnam. The current study aims to investigate transparation of indicators non-financial and financial especially in telecommunication and technology industry sector.

The indicators of non-financial are measured using some surrogates such as corporate action, GCG elements in organization structure, Bureau van Dijk Electronic Publishing (BvDEP) independence indicator, and audited financial report result.

The indicator of financial is measured using one surrogate as return of total assets. Samples used in this study are telecommuncation and technology companies from three countries are Indonesia, Malaysia, and Vietnam. Data obtained from OSIRIS database from year 2005 to 2007 is examined using regression analysis.

This study result is factors that influence net profit in Indonesia, Malaysia, and Vietnam are vary. In Indonesia, independence indicator and corporate action affect net profit. In Malaysia, the influencing factors are corporate action, independence indicator, financial report result, and return of total assets. Meanwhile, in Vietnam, corporate actions, the number of GCG members and return of total assests influence the net profit of telecommunication and technology companies.

Keywords: *indicators of financial & non-financial, telecommunication and technology industry, Indonesia, Vietnam, Malaysia.*

PENDAHULUAN

Latar belakang penelitian ini adalah pentingnya mengetahui pengaruh indikator non-keuangan dan keuangan pada sektor industri telekomunikasi dan teknologi. Dengan mengetahui pengaruh indikator-indikator ini pada sektor industri

telekomunikasi dan komunikasi diharapkan akan mampu dibuat kebijakan yang tepat untuk menumbuhkembangkan sektor industri telekomunikasi dan teknologi. Kebijakan yang tepat harus ada benchmark, oleh karena itu penelitian ini mengobservasi kondisi di Indonesia berdasarkan benchmark negara-negara sekitarnya, yaitu Malaysia dan Vietnam.

Penelitian ini akan mengobservasi kemajuan sektor industri telekomunikasi dan teknologi di tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Sektor industri telekomunikasi dan teknologi dipilih karena sektor industri telekomunikasi dan teknologi merupakan salah satu indikator suatu kemajuan bangsa yang penting. Negara yang menguasai sektor industri teknologi dan telekomunikasi akan mampu bersaing dan berada dalam posisi kemajuan di segala bidang dengan lebih baik dan lebih cepat. Tumbuhkembangnya suatu sektor industri tertentu dalam hal ini sektor industri teknologi dan telekomunikasi ini juga menandakan perhatian dan fokus suatu kebijakan perekonomian suatu negara, peradaban suatu negara, dan juga kemampuan sumber daya suatu negara. Hal ini sesuai dengan Achjari dan Suryaningsum (2008), Achjari *et al.* (2009).

Penelitian ini memfokuskan pada perusahaan-perusahaan-perusahaan teknologi dan telekomunikasi dengan alasan sebagai berikut: penelitian yang ada belum melihat faktor sektor industri sebagai hal yang menarik untuk dikaji secara spesifik. Padahal industri mempunyai regulasi yang berbeda untuk tiap sektornya. Kedua, penelitian ini secara spesifik berfokus pada perusahaan teknologi dan telekomunikasi karena ingin mengobservasi tingkat kemajuan suatu bangsa, serta pemahaman terhadap faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kemampuannya dalam memperoleh laba pada sektor industri teknologi dan telekomunikasi. Hal ini sesuai dengan Achjari dan Suryaningsum (2008), Achjari *et al.* (2009).

Penelitian ini menarik dan penting untuk diteliti karena negara Indonesia, Vietnam, dan Malaysia memiliki kesamaan sumber daya alam dan manusia yang dimiliki oleh ketiga negara tersebut dan juga berkaitan dengan kebijakan negara-negara tersebut dalam upaya proses penumbuhkembangkan perekonomiannya. Negara Vietnam relatif jarang diteliti padahal relatif berimbangannya kemajuan pasar modal di negara Indonesia dan negara Vietnam menandakan suatu kemiripan kebijakan perekonomian yang hampir serupa di dua negara tersebut dalam hal memacu dan menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan yang ada di dua negara tersebut. Negara Malaysia merupakan negara yang serumpun dengan negara Indonesia, namun demikian dalam perkembangan perekonomiannya pada saat ini memiliki kemampuan potensial yang sangat baik di kawasan ASEAN. Hal ini terbukti dengan relatif singkatnya dalam memulihkan

krisis ekonomi yang terjadi pada tahun memiliki 1997. Krisis dimulai dari Thailand kemudian menyebar ke berbagai negara ASEAN bahkan di Asia. Dalam hal ini, Indonesia adalah negara yang mengalami krisis ekonomi paling parah dan terlama dalam memulihkan dampak krisis tersebut. Dalam penelitian ini, dilakukan uji empiris komparasi untuk masing-masing negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Ada lima variabel yang diujikan juga per masing-masing negara yaitu aksi perusahaan, kualitas laporan keuangan audit, independensi kepemilikan publik, return atas aset total, dan jumlah pengurus GCG dalam struktur organisasi perusahaan.

Penelitian ini mencoba mengidentifikasi dan menguji secara empiris pengaruh factor-faktor non-keuangan dan satu factor keuangan terhadap kinerja perusahaan telekomunikasi dan teknologi. Salah satu factor non-keuangan yang belum pernah diuji dalam penelitian-penelitian di Indonesia adalah factor aksi perusahaan, padahal aksi perusahaan merupakan suatu proksi transparansi dalam bidang non keuangan. Aksi perusahaan merupakan variabel baru yang dikenalkan oleh Achjari, dkk (2009). Factor non-keuangan lainnya yang diuji dalam penelitian ini adalah jumlah kelengkapan pengurus GCG dalam organisasi dilakukan dengan menghitung jumlah total pengurus GCG dalam perusahaan teknologi dan telekomunikasi, hal ini dilakukan untuk memperbaiki berbagai proksi mengenai kelengkapan susunan GCG, Wedari (2004) melakukan penghitungan susunan pengurus GCG dengan proksi komite audit yang dinyatakan dengan ada atau tidak ada, Herawaty (2008) hanya menjustifikasi komisararis independen sebagai proksi pengurus GCG, sedangkan Nuryaman (2008), Wardhani (2008) menjustifikasi proporsi komisararis independen terhadap jumlah total komisararis perusahaan. Menurut peneliti, proksi pengurus GCG bukan hanya komisararis independen ataupun komite audit hal ini karena komisararis independen dan komite audit hanya bagian dari susunan pengurus GCG. Kelengkapan susunan pengurus GCG adalah komisararis independen, komite remunerasi, komite audit, komite legalitas, komite kepatuhan, komite mitigasi, dan sekretaris perusahaan. Memang pada awal adanya aturan mengenai GCG, Bapepam pada tahun 2001 mengeluarkan aturan mengenai susunan pengurus GCG minimal ada tiga yaitu komisararis independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan. Atas dasar ini peneliti merasa perlu memperbaiki dengan melakukan penghitungan secara total jumlah kelengkapan susunan pengurus GCG sebagai salah

satu proksi factor non-keuangan. Sedangkan factor non-keuangan yang lainnya adalah indikator independensi kepemilikan publik oleh BvDEP merupakan proksi baru dalam perkembangan penelitian kepemilikan di Indonesia, karena konsentrasi kepemilikan biasanya dilakukan dengan proksi yang lain, yaitu kepemilikan managerial maupun kepemilikan institusional (Midiastuty & Machfoedz, 2003; Wedari, 2004; Siregar & Siddarta, 2006; Herawaty, 2008).

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Labas Bersih

Profitabilitas merupakan salah satu indikator keberhasilan perusahaan untuk dapat menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi perusahaannya. Penelitian Dyer dan McHugh (1975) menunjukkan bahwa perusahaan yang memperoleh laba cenderung tepat waktu menyampaikan laporan keuangannya dan sebaliknya jika mengalami rugi. Carslaw dan Kaplan (1991) menemukan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian meminta auditornya untuk menjadwalkan pengauditannya lebih lambat dari yang seharusnya, akibatnya penyerahan laporan keuangannya terlambat. Kedua penelitian ini menyatakan bahwa perusahaan akan cenderung menunda penyampaian laporan keuangan apabila perusahaan yakin terdapat berita buruk dalam laporan keuangan tersebut, karena berpengaruh pada kualitas laba.

Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi dapat dikatakan laporan keuangan perusahaan tersebut mengandung berita baik. Perusahaan yang memiliki berita baik akan cenderung menyerahkan laporan keuangannya tepat waktu. Hal yang sebaliknya berlaku jika profitabilitas perusahaan rendah yang berarti mengandung berita buruk, sehingga perusahaan cenderung tidak tepat waktu menyerahkan laporan keuangannya.

Independensi Kepemilikan Publik

Siregar (2008) menyatakan, kondisi di Indonesia yang berkaitan dengan terjadinya konsentrasi kepemilikan, masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas muncul karena adanya pemisahan hak aliran kas dengan hak kontrol, bukan lagi pemisahan kepemilikan dan kontrol seperti dalam Jensen dan Meckling (1976). Claessens et al., (1999) mendefinisikan ekspropriasi sebagai proses yang

digunakan pemegang saham pengendali untuk memaksimalkan kekayaan sendiri atau redistribusi kekayaan dari pihak lain melalui suatu kekuatan kontrol. Claessens et al., (1999), (2000), menguji ekspropriasi pemegang saham minoritas pada perusahaan publik di sembilan Negara Asia dengan mengkaji dampak pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol terhadap nilai perusahaan. meneliti struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di sembilan negara di Asia Timur. Hasilnya adalah kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi, dimana kepemilikan tersebut dicapai dengan berbagai cara yaitu struktur piramid, kepemilikan silang, dan perangkapan manajemen oleh pemilik. Indonesia menunjukkan struktur kepemilikan piramid yang terbesar yaitu 66,9% dari sampel dan kedua terbesar dalam perangkapan manajemen dan pemilik, setelah Malaysia, yaitu 84,6% dari sampel perusahaan Indonesia. Dinyatakan pula bahwa terdapat separation of *ownership* dan *control* dari perusahaan-perusahaan di Indonesia, bahkan besarnya perbedaan antara kedua hal tersebut menunjukkan kedua terbesar setelah Jepang.

Kepemilikan piramida dan lintas kepemilikan merupakan dua mekanisme yang lazim digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk meningkatkan kontrol melebihi klaim keuangan terhadap perusahaan. Secara khusus kondisi di Indonesia, La Porta dkk. (1998) menemukan bahwa *French origin countries group* (termasuk Indonesia) memiliki konsentrasi kepemilikan tertinggi dibandingkan dengan tiga *origin countries group* yang lain. Dalam kelompok tersebut bahkan sampel perusahaan Indonesia menunjukkan konsentrasi kepemilikan yang lebih besar dari rata-rata kelompoknya yaitu pemegang saham tiga terbesar menguasai kepemilikan rata-rata 58%. Dalam hal ini terjadi pendapat bahwa lemahnya perlindungan hukum dan lingkungan institusional (*law and enforcement*) berkaitan sangat erat dengan kepemilikan yang terkonsentrasi (La Porta dkk., 1998 dan 2000). Hasil inipun masih ada kemungkinan *understated* sebab mereka berdasarkan data kepemilikan langsung, bukan kepemilikan akhir (*ultimate ownership*). Kemudian mereka berusaha memperbaiki pengukuran variabel konsentrasi kepemilikan dengan menggunakan data kepemilikan akhir melalui penelusuran rantai kepemilikan sampai menemukan siapa yang memiliki *voting rights* paling besar pada saat mereka meneliti struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan di 27 negara maju (La Porta dkk, 1999). Dengan menggunakan metodologi La

Porta dkk. (1999) tersebut, Claessens et al., (1999, 2000) meneliti tentang pemegang saham pengendali yang terdiri dari individu, keluarga, atau institusi yang memiliki kontrol terhadap sebuah perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung pada tingkat pisah batas (*cut-off*) hak control tertentu. Pemegang saham pengendali disebut juga sebagai pemilik ultimat terbesar. Ekspropriasi adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain. Ada beberapa kebijakan yang dapat menimbulkan ekspropriasi seperti kebijakan operasi perusahaan (gaji dan tunjangan yang tinggi, bonus dan kompensasi yang besar, dana pension yang tinggi, dan dividen tidak di bagi), kebijakan kontraktual (harga transfer yang lebih murah kepada perusahaan yang berada dalam sepengendali, penjualan aktiva kepada pihak lain dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar, dan berutang dengan motif nondilusi kontrol), kebijakan penjualan kontrol (menjual kontrol yang dimilikinya kepada pihak lain dengan harga premium), kebijakan *freezing out* (menjual saham perusahaan kepada pihak lain yang juga terkait dengan pemegang saham pengendali dengan harga yang lebih murah dari harga pasar).

Beberapa studi menunjukkan bahwa terdapat dua potensial *agency problem* yang berkaitan dengan kepemilikan, yaitu *agency problem* antara manajemen dan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976) dan *agency problem* antara pemegang saham mayoritas dan minoritas (Shleifer dan Vishny, 1997). *Agency problem* yang pertama terjadi jika kepemilikan tersebar di tangan banyak pemegang saham sehingga tidak satu pihakpun yang dapat atau yang mau mengontrol manajemen, sehingga hanya ada pihak manajemen yang relatif tanpa adanya kontrol untuk menjalankan perusahaan. Hal ini menyebabkan perusahaan bisa dijalankan sesuai dengan keinginannya manajemen sendiri. Sedangkan *agency problem* yang kedua akan terjadi jika terdapat seorang pemegang saham memegang saham mayoritas dan beberapa pemegang saham lain yang kepemilikannya minoritas. Hal ini menyebabkan pemegang saham mayoritas memiliki kendali absolut sehingga dapat melakukan tindakan yang menguntungkan pemegang saham mayoritas tetapi merugikan pemegang saham minoritas.

Hubungan antara struktur kepemilikan dan praktik akuntansi di negara-negara yang telah mengadopsi standar akuntansi internasional ditemukan bahwa ada hubungan positif antara

tingkat absensi dengan tingkat konsentrasi kepemilikan. Tingkat absensi dalam arti tingkat topik yang belum diadopsi dalam standar akuntansi lokal walaupun topik tersebut sudah diatur dalam standar akuntansi internasional. Indonesia termasuk dalam sampel mereka, diantara 30 negara, Indonesia menduduki rangking ke-10 dalam hal tingkat absennya (ranking berdasarkan yang terendah tingkat absennya). Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, rangking Indonesia ini lebih baik dari Malaysia, Thailand dan Philipina, namun lebih buruk dari Singapura. Konsentrasi kepemilikan dapat membawa dua hipotesis yang berlawanan yaitu *entrenchment hypothesis* dan *alignment hypothesis*. Sama seperti *management entrenchment problem* seperti yang dibahas dalam Morck dkk. (1988), pemegang saham mayoritas yang secara efektif mengendalikan perusahaan, akan juga mengendalikan informasi akuntansi yang dihasilkan. Hal ini akan menurunkan kredibilitas informasi akuntansi yang dihasilkan bagi pasar. Akibat akhirnya adalah rendahnya hubungan antara angka-angka yang dihasilkan dari akuntansi dengan ukuran pasar. Sebaliknya, dalam *alignment hypothesis*, konsentrasi kepemilikan akan membawa dampak adanya pemegang saham mayoritas yang akan berusaha meningkatkan kredibilitas informasi akuntansi yang dihasilkan, seperti dalam konteks kepemilikan oleh pihak manajemen. Pemegang saham kendali sangat berkepentingan untuk membangun reputasi perusahaan tanpa melakukan *expropriation of resources at the expense of minority interest*. Komitmen ini sangat kuat sebab jika pemegang saham mayoritas melakukan *expropriation* pada saat dia memegang saham dalam jumlah besar, pemegang saham minoritas dan pasar akan mendiskon harga pasar saham perusahaan tersebut, akhirnya pemegang saham mayoritaslah yang mengalami kerugian dalam jumlah besar. Secara khusus, adanya konsentrasi kepemilikan akan meningkatkan hubungan antara angka-angka akuntansi dengan ukuran pasar perusahaan.

La Porta dkk. (2002) dan Claessens dkk. (2002) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan dalam hal *cash flow rights* akan meningkatkan nilai perusahaan. La Porta dkk. (2002) menggunakan sampel 539 perusahaan besar dari 27 negara maju. Sedangkan, Claessens dkk. (2002a) menggunakan data dari 1.301 perusahaan terbuka di 8 negara Asia Timur, termasuk Indonesia. Dalam penelitian Claessens dkk. (2002) Indonesia adalah satu-satunya negara yang menunjukkan efek *entrenchment* dan

alignment dengan tingkat signifikansi yang sama kuatnya. Sampel perusahaan Indonesia menunjukkan hubungan positif antara *ownership* dengan *valuation*. Namun sampel tersebut juga menunjukkan hubungan negatif antara besarnya perbedaan *ownership* dan *control* dengan *valuation* pada tingkat signifikansi 1%. Secara khusus, hubungan antara konsentrasi kepemilikan dengan daya informasi akuntansi diteliti oleh Fan dan Wong (2002). Dengan menggunakan data kepemilikan akhir dari penelitian Claessens dkk. (2002), Fan dan Wong menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan dalam hal *control right* berhubungan dengan rendahnya daya informasi akuntansi di 8 negara Asia Timur, yaitu Indonesia, Hong Kong, Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Taiwan dan Thailand. Disamping itu, mereka menemukan bahwa Indonesia menunjukkan tingkat perbedaan yang terbesar antara *control* dan *ownership* diantara 8 negara Asia Timur.

Pengurus GCG dalam Struktur Organisasi

Dipiazza & Eccles (2002) menyatakan bahwa ada tiga elemen kunci untuk meningkatkan kepercayaan publik yaitu: a) *spirit of transparency*, b) *culture of accountability*, dan c) *people of integrity*. Transparansi dan akuntabilitas berbagai pihak yang terlibat dalam *Corporate Reporting Supply Chain* tidak cukup untuk meningkatkan kepercayaan publik. Pada akhirnya efektivitas ke dua elemen ini sangat tergantung pada integritas dari setiap pihak yang terkait dalam *Corporate Reporting Supply Chain*. Tanpa integritas manusia yang merupakan pondasi sistem pelaporan keuangan, maka tidak akan ada kepercayaan publik (Dipiazza & Eccles, 2002). Dalam penelitian ini, kelengkapan unsur struktur GCG merupakan unsur-unsur yang dibentuk oleh organisasi untuk mendukung terciptanya kondisi GCG. Unsur-unsur tersebut mencakupi: komisaris independen, komite audit, sekretaris perusahaan, komite remunerasi, komite nominasi, komite legalitas, direktur independen.

Jumlah struktur organisasi GCG yang merupakan kelengkapan struktur organisasi sebagai implementasi GCG yang telah dipersyaratkan oleh pihak regulator. Variabel ini dipilih karena ada kemungkinan perusahaan tidak memiliki susunan kelengkapan struktur GCG, misalnya hanya direktur dan komisaris. Beberapa negara memiliki persyaratan yang sama untuk diimplementasikan dalam GCG. Persyaratan tersebut adalah komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite kepatuhan, komite legal, komite risiko. Di

Indonesia sendiri pada tahun 2001, sesuai dengan aturan Bapepam, dinyatakan bahwa kelengkapan GCG adalah komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Salah satu fungsi utama dari komisaris independen adalah untuk menjalankan fungsi monitoring yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan. Keberadaan komisaris dapat menyeimbangkan kekuatan pihak manajemen (terutama CEO) dalam pengelolaan perusahaan melalui fungsi monitoringnya. Dalam menjalankan fungsinya, komisaris independen akan sangat membutuhkan informasi yang akurat dan berkualitas. Konservatisme merupakan alat yang sangat berguna bagi *board of directors* (terutama komisaris independen) dalam menjalankan fungsi mereka sebagai pengambil keputusan dan pihak yang memonitor manajemen. *Board of directors* yang kuat (*board of directors* yang didominasi oleh komisaris independen) akan mensyaratkan informasi yang lebih berkualitas sehingga mereka akan cenderung untuk lebih menggunakan prinsip akuntansi yang lebih konservatif. Di lain pihak, *board of directors* yang didominasi oleh pihak internal atau *board of directors* yang memiliki insentif monitoring yang lemah akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi manajer untuk menggunakan prinsip akuntansi yang lebih agresif (kurang konservatif).

Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal dan eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas. Oleh karena itu keberadaan komite audit ini akan mendorong penggunaan prinsip konservatisme yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit ini akan meningkatkan

kualitas keseluruhan dari proses pelaporan keuangan perusahaan dengan penggunaan prinsip konservatisme.

Kualitas Laporan Keuangan Auditan

Akuntan publik adalah salah satu pihak yang memegang peranan penting untuk tercapainya laporan keuangan yang berkualitas di pasar modal. Akuntan publik bertugas memberikan *assurance* terhadap kewajaran laporan keuangan yang disusun dan diterbitkan oleh manajemen. *Assurance* terhadap laporan keuangan tersebut, diberikan akuntan publik melalui opini akuntan publik. Menurut PSA 29 SA Seksi 508 dalam Standar Profesional Akuntan Publik ada lima jenis pendapat akuntan, yaitu: (1) pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*); (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjelasan (*unqualified opinion with explanatory language*); (3) pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*); (4) pendapat tidak wajar (*adverse opinion*); dan (5) pernyataan tidak memberikan pendapat (*disclaimer opinion*). Whittred (1980) menyatakan bahwa laporan keuangan yang memberikan pendapat *qualified opinion* mengalami *audit delay* lebih lama. Carslaw dan Kaplan (1991) juga menyatakan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan berhubungan positif dengan opini audit yang diberikan oleh akuntan publik. Perusahaan yang menerima opini selain *unqualified opinion* memiliki *audit delay* yang lebih lama atau cenderung tidak akan tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena hal tersebut dianggap berita buruk. Sebaliknya, perusahaan yang mendapatkan *unqualified opinion* dari auditor untuk laporan keuangannya cenderung akan lebih tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangannya karena *unqualified opinion* merupakan berita baik dari auditor.

Corporate Action

Aksi perusahaan merupakan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dan diumumkan kepada publik. Hal ini merupakan cerminan dari tertib administrasi dan transparansi dari sisi non keuangan. Aksi perusahaan dalam hal ini juga akan mempengaruhi pergerakan harga saham, baik aksi perusahaan yang berskala nasional maupun internasional. Aksi perusahaan dalam hal ini meliputi *company meeting, listing status change, announcement, preferential offer, bonus, new listing, buy back, issuer name change, preference conversion,*

local code change, arrangement, security description change, international code change, sedol change subdivision, take over, dan lain-lain.

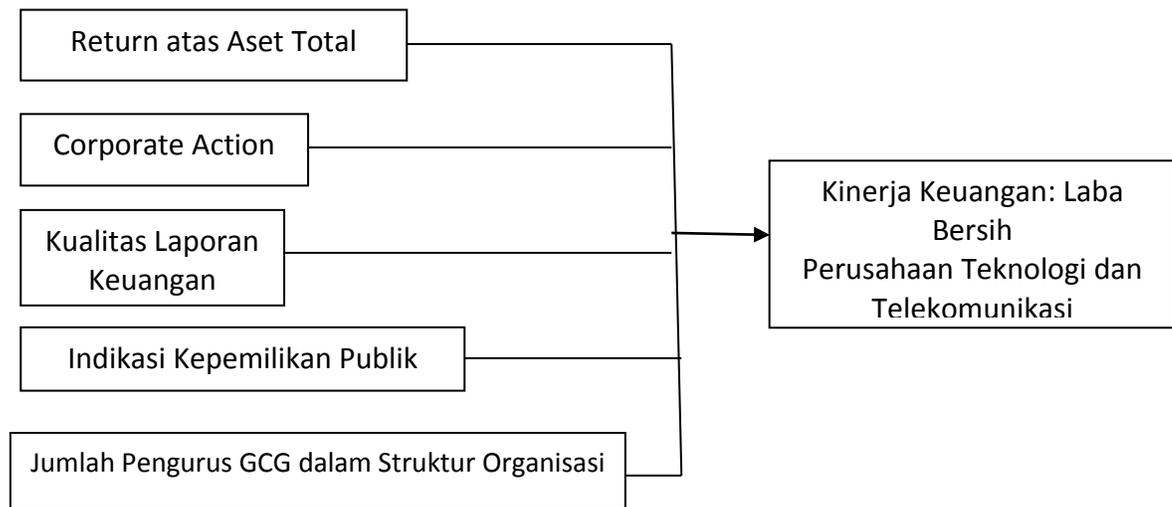
Pengembangan Hipotesis

Tata kelola perusahaan yang baik akan menyebabkan kinerja perusahaan semakin baik. Tata kelola perusahaan dipengaruhi oleh transparansi keuangan maupun nonkeuangan. Transparansi non keuangan dapat diobservasi dari tingkat aksi perusahaan, independensi kepemilikan publik, jumlah susunan struktur tata kelola perusahaan. Untuk transparansi keuangan maka bisa dilihat dari pengelolaan aset yang optimal. Oleh karena itu hipotesis penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

- H1: *Corporate Action*, indikator independensi kepemilikan publik, jumlah susunan struktur GCG, kualitas laporan keuangan auditan, rasio return atas aset perusahaan berpengaruh pada capaian laba bersih di sektor industri teknologi dan telekomunikasi di negara Malaysia.
- H2: *Corporate Action*, indikator independensi kepemilikan publik, jumlah susunan struktur GCG, kualitas laporan keuangan auditan, rasio return atas aset perusahaan berpengaruh pada capaian laba bersih di sektor industri teknologi dan telekomunikasi di negara Indonesia.
- H3: *Corporate Action*, indikator independensi kepemilikan publik, jumlah susunan struktur GCG, kualitas laporan keuangan auditan, rasio return atas aset perusahaan berpengaruh pada capaian laba bersih di sektor industri teknologi dan telekomunikasi di negara Vietnam.

Berdasarkan uraian di atas, model penelitian ini ditunjukkan dalam Gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1
Model Penelitian



Sampel Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

Populasi penelitian ini adalah semua laporan tahunan sektor industri teknologi dan telekomunikasi yang terdaftar di masing-masing bursa saham negara Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. Digunakannya tahun amatan 2005, 2006, dan 2007 adalah untuk dapat melihat konsistensi pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pada tahun 2003 semua unsur kelengkapan GCG dianggap telah terbentuk karena aturan-aturan mengenai GCG di negara-negara ASEAN mulai ada pada sekitar tahun 2001-an. Sampel yang digunakan adalah perusahaan-perusahaan sektor industri teknologi dan telekomunikasi di tiga negara Malaysia, Indonesia, dan Vietnam tersebut, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di pasar modal pada kawasan negara negara Malaysia, Indonesia, dan Vietnam.
2. Benchmark klasifikasi industri: sektor industri teknologi dan telekomunikasi.
3. Termasuk dalam 200 besar perusahaan sektor industri teknologi dan telekomunikasi di negara Malaysia, Indonesia, dan Vietnam. negara Malaysia, Indonesia, dan Vietnam.
4. Tutup buku berakhir 31 Desember

Di sektor teknologi dan telekomunikasi di kawasan negara Malaysia, Indonesia, dan Vietnam untuk tahun 2005, 2006, dan 2007 diperoleh sampel dari Indonesia sebanyak 38, Malaysia sebanyak 192, dan Vietnam sebanyak 24 perusahaan.

Difinisi dan Pengukuran Variabel

Variabel yang dijelaskan (*dependent variable*) adalah laba bersih yang di-log-kan. Adapun variabel penjelas (*independent variable*) yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Indikator independensi kepemilikan saham publik oleh BvDEP (indicator non-financial).
2. Aksi perusahaan (indicator non-financial).
3. Kualitas laporan auditan (indicator non-financial).
4. Jumlah struktur organisasi GCG (indicator non-financial).
5. Return atas total aset (indicator financial).

Definisi operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Laba bersih adalah laba yang diperoleh dari laba bersih setelah pajak perusahaan per tahun.
2. Indikator independensi oleh BvDEP. Berdasarkan OSIRIS Data Guide (2003) Indikator kepemilikan yang sudah dilakukan oleh BvDEP yang ditandai dengan penetapan nilai yang telah dilakukan oleh Osiris untuk negara-negara ASEAN, berupa A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C, C-, D, dan U.

Variabel ini diukur berdasarkan nilai yang peneliti lekatkan untuk simbol huruf tersebut. Nilai tertinggi sebesar 11 dilekatkan pada A+, sedangkan nilai yang terendah sebesar 1 dilekatkan pada U (*unknown*). Adapun detail Indikator BvDEP *Independence* digunakan untuk membantu pengguna dalam hal mengidentifikasi perusahaan-perusahaan independen dengan menandai derajat independensi perusahaan berdasarkan pemegang saham. Indikator A adalah perusahaan dengan kepemilikan yang tercatat tidak ada yang melebihi 24,99% baik secara langsung maupun total. BvDEP mengklasifikasikan lebih lanjut dalam A+, A, dan A-. Indikator B diberikan kepada perusahaan dengan persentase kepemilikan tercatat baik langsung atau total tidak lebih dari 49,99%, tetapi memiliki satu atau lebih pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 24,99%. BvDEP kemudian mengklasifikasikan dalam B+, B, dan B-. Indikator C diberikan pada perusahaan dengan kepemilikan pemegang saham tercatat (tidak termasuk tipe A dan B di atas) dengan suatu kepemilikan langsung dan total lebih dari 49,99%. Indikator C juga diberikan pada perusahaan yang mengindikasikan adanya kepemilikan mutlak (*ultimate owner*). Sedangkan indikator U diberikan pada perusahaan-perusahaan yang tidak dikategorikan A, B, atau C yang mengindikasikan suatu derajat yang tidak diketahui independensinya.

3. Aksi perusahaan merupakan aksi yang dilakukan oleh perusahaan dan diumumkan perusahaan kepada publik yang merupakan cerminan dari tertib administrasi dan transparansi dari sisi non keuangan. Aksi perusahaan dalam hal ini juga akan mempengaruhi pergerakan harga saham karena aksi tersebut bisa berskala nasional dan internasional. Aksi perusahaan dalam hal ini meliputi *company meeting, listing status change, announcement, preferential offer, bonus, new listing, buy back, issuer name change, preference conversion, local code change, arrangement, security description change, international code change, take over*, dan lain-lain. Operasionalisasi dari aksi perusahaan adalah dihitung dari jumlah pengungkapan atau pengumuman aksi perusahaan (skala rasio).
4. Kualitas laporan auditan merupakan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang hasilnya menunjukkan status opini auditor, dalam hal ini wajar tanpa syarat (nilai 4), wajar dengan

penjelasan (nilai 3), tanpa opini (nilai 2), dan tidak teraudit (nilai 1).

5. Struktur organisasi GCG dalam hal ini merupakan kelengkapan struktur organisasi sebagai implementasi GCG yang telah dipersyaratkan oleh pihak regulator. Variabel ini dipilih karena ternyata banyak data menunjukkan sektor perbankan tidak memiliki susunan kelengkapan struktur GCG misalnya hanya direktur dan komisaris. Untuk masing-masing negara memiliki persyaratan yang sama untuk diimplementasikan dalam GCG. Persyaratan tersebut adalah komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite compliance, komite legal, komite risiko. Di Indonesia sendiri pada tahun 2001 sesuai dengan aturan Bapepam dinyatakan bahwa kelengkapan GCG adalah komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.

Metode Analisis Data

Syarat untuk melakukan regresi yaitu normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi menunjukkan hasil yang tidak ada masalah (hasil olah data terlampir). Untuk data outlier, dilakukan secara otomatis oleh SPSS dengan program *missing value-exclude cases listwise*. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu model data diuji dengan menilai kelayakan model regresi, menilai keseluruhan model (*overall model fit*), dan menguji koefisien regresi. Adapun model dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih pada masing-masing negara} = a + b_1 \text{Independensi kepemilikan} + b_2 \text{Jumlah Struktur Organisasi} + b_3 \text{Aksi Perusahaan} + b_4 \text{Kualitas Laporan Audit} + b_5 \text{Return atas Aset Total} + e$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.

Berikut ini merupakan hasil statistika deskriptif atas variabel-variabel yang diuji untuk negara Malaysia, Indonesia, dan Vietnam (lihat tabel 1). Secara ringkas nilai rerata hasil pengujian statistika deskriptif untuk ketiga negara Malaysia, Indonesia, dan Vietnam adalah sebagaiberikut ini. Ada tiga nilai rerata yang tertinggi yang diperoleh negara Malaysia, yaitu kualitas laporan keuangan, independensi kepemilikan publik, dan jumlah struktur *good corporate governance*.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Perusahaan Teknologi dan Telekomunikasi pada Negara Malaysia, Indonesia, dan Vietnam

Keterangan	Malaysia	Indonesia	Vietnam
Lababersih	3,19	3,58*	2,90
AksiPersh	8,39	16,71*	1,84
KualitasLap	3,92*	3,88	2,05
Independensi	7,65*	3,13	3,68
RoTA	11,60*	6,63	12,88*
JumlStruktur	4,92*	1	1

Sumber: Data sekunder yang diolah (2011)

Keterangan: tanda* menunjukkan nilai tertinggi di antar tiga negara tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa kualitas laporan auditan merupakan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang hasilnya menunjukkan status opini auditor, dalam hal ini wajar tanpa syarat (nilai 4), wajar dengan penjelasan (nilai 3), tanpa opini (nilai 2), dan tidak teraudit (nilai 1). Sedangkan indikator independensi kepemilikan publik digunakan untuk membantu pengguna dalam hal mengidentifikasi perusahaan-perusahaan independen dengan menandai derajat independensi perusahaan berdasarkan pemegang saham. Nilai yang dicapai Malaysia sebesar 7,65 berkisar antara B+ dan B, yang mengindikasikan bahwa nilai B adalah perusahaan dengan persentase kepemilikan tercatat baik langsung atau total tidak lebih dari 49,99%, tetapi memiliki satu atau lebih pemegang saham dengan kepemilikan lebih dari 24,99%. Untuk negara Indonesia 3,13 dan Vietnam 3,68 yang berarti berada pada kisaran nilai C dan C-. Indikator C diberikan pada perusahaan dengan kepemilikan pemegang saham tercatat (tidak termasuk tipe A dan B di atas) dengan suatu kepemilikan langsung dan total lebih dari 49,99%. Indikator C juga diberikan pada perusahaan yang mengindikasikan adanya kepemilikan mutlak (*ultimate owner*).

Proses pelaksanaan implementasi GCG yang diobservasi dari struktur organisasi GCG dalam hal ini merupakan kelengkapan struktur organisasi sebagai implementasi GCG yang telah dipersyaratkan oleh pihak regulator. Variabel ini dipilih karena ternyata banyak data menunjukkan sektor perbankan tidak memiliki susunan kelengkapan struktur GCG misalnya hanya direktur dan komisaris. Untuk masing-masing negara memiliki persyaratan yang sama untuk diimplementasikan dalam GCG. Persyaratan tersebut adalah komisaris independen, komite audit, komite renumerasi, komite nominasi, komite compliance, komite legal, komite risiko. Untuk

Malaysia yang memiliki nilai 4,92 hal ini dapat disimpulkan bahwa Negara Malaysia untuk sektor industri telekomunikasi dan teknologi sudah memiliki struktur organisasi kelengkapan GCG yang lebih baik, hal ini berkebalikan dengan ekonomi Indonesia dan ekonomi Vietnam yang hanya memiliki kelengkapan struktur GCG dengan nilai rerata 1. Semua perusahaan telekomunikasi dan teknologi di Indonesia dan Vietnam hanya terdiri dari Sekretaris Perusahaan untuk kelengkapan pelaksanaan GCG. Khusus perusahaan telekomunikasi dan teknologi sendiri pelaksanaan pembentukan struktur GCG di Indonesia dan Vietnam berarti hanya memilih syarat minimal yaitu sekretaris perusahaan. Tetapi hal ini sesungguhnya ironis karena penancangan program GCG di Indonesia sudah ditetapkan aturannya sejak tahun 2001 sesuai dengan aturan Bapepam dinyatakan bahwa kelengkapan GCG adalah komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan.

Untuk negara Indonesia ada dua nilai rerata yang lebih tinggi dibandingkan dua negara lainnya dalam hal laba bersih dan aksi perusahaan. Laba bersih adalah laba yang diperoleh dari laba bersih setelah pajak perusahaan per tahun sedangkan aksi perusahaan merupakan aksi yang dilakukan oleh perusahaan dan diumumkan perusahaan kepada publik yang merupakan cerminan dari tertib administrasi dan transparansi dari sisi non keuangan.

Untuk negara Vietnam hampir semua nilai rerata (Laba bersih, aksi perusahaan, kualitas laporan keuangan, dan jumlah struktur GCG) berada pada urutan terendah kecuali nilai rerata RoTA (return on total aset), yang berarti nilai return atas pemanfaatan aset sangat besar.

Malaysia

Dari data sebanyak 192 perusahaan di Malaysia, pengolahan dilakukan hanya pada 130 data yang lengkap semua faktor-faktornya yaitu aksi perusahaan, kualitas laporan auditan, independensi kepemilikan, return atas aset total, dan jumlah struktur organisasi GCG terhadap laba bersih selama tiga tahun berturut-turut (2007 sd 2005). Dalam statistika deskriptif, semua variabel independen dalam hal ini berada dalam rata-rata kisaran. Dari aksi perusahaan Malaysia untuk tahun 2007 sd 2005, diperoleh rata-rata aksi perusahaan sebesar 8,39. Indikator kepemilikan diperoleh rata-rata sebesar 7,65 yang berarti bahwa indikator independensi kepemilikan publik yang dinilai oleh BvDEP di Malaysia menunjukkan kisaran antara 7 dan 8. Angka 7 setara dengan B, sedangkan angka 8 setara dengan B+. Hal ini berarti nilai rata-rata independensi kepemilikan publik Malaysia ini lebih besar jika dibandingkan rata-rata independensi kepemilikan publik untuk Indonesia dan Vietnam.

Kualitas laporan auditan yang merupakan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP yang hasilnya menunjukkan status opini auditor, dalam hal ini wajar tanpa syarat, wajar dengan penjelasan, tanpa opini, dan tidak teraudit. Hasil rata-rata kualitas laporan auditan yang diperoleh adalah sebesar 3,92 dengan deviasi standar yang relatif rendah yaitu 0,344 yang berarti hampir seluruh perusahaan teknologi dan telekomunikasi di negara Malaysia memiliki kualitas auditan yang sangat bagus, wajar tanpa syarat. Rata-rata log laba bersih Indonesia sebesar 3,558. Sementara hanya rata-rata log laba bersih Vietnam yang berada di bawah Malaysia yaitu sebesar 2,9079. Hal ini juga merupakan penjelasan mengapa hasil regresi untuk kualitas audit berpengaruh signifikan tetapi

berpengaruh negatif terhadap capaian rata-rata log laba bersih Malaysia.

Jumlah struktur organisasi GCG dalam hal ini merupakan kelengkapan struktur organisasi sebagai implementasi GCG yang telah dipersyaratkan oleh pihak regulator. Variabel ini dipilih karena ternyata banyak data menunjukkan sektor perbankan tidak memiliki susunan kelengkapan struktur GCG misalnya hanya direktur dan komisaris. Untuk masing-masing negara memiliki persyaratan yang sama untuk diimplementasikan dalam GCG. Persyaratan tersebut adalah komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite nominasi, komite compliance, komite legal, komite risiko. Hasil rata-rata jumlah struktur organisasi kelengkapan GCG yang diperoleh untuk Malaysia adalah sebesar 4,92 yang lebih besar jika dibandingkan Indonesia dan Vietnam.

Hasil regresi untuk lima variabel independen, yaitu aksi perusahaan, kualitas laporan auditan, independensi kepemilikan, return atas aset total, dan jumlah struktur organisasi GCG terhadap laba bersih menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,530. Hal ini berarti bahwa 0,530 variasi laba bersih dapat dijelaskan oleh jumlah banyaknya perusahaan, aksi perusahaan, kualitas laporan auditan, independensi kepemilikan, return atas aset total, dan jumlah struktur organisasi GCG. Hasil uji ANOVA menghasilkan F hitung sebesar 30,094 dengan signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05) menunjukkan bahwa model regresi dengan melibatkan variabel-variabel rating keseluruhan risiko negara, jumlah banyaknya perusahaan, aksi perusahaan, kualitas laporan auditan, independensi kepemilikan, return atas aset total, dan jumlah struktur organisasi GCG berpengaruh pada laba bersih. Ringkasan hasil statistika termasuk untuk koefisien regresi negara Malaysia tersaji di Tabel 2.

Tabel 2a: Statistik Deskriptif

Variabel	Statistika Deskriptif		
	Mean	Std. Dev.	N
Lababersih	3,19	0,81	130
AksiPersh	8,39	5,80	130
KualitasLap	3,92	0,34	130
Independensi	7,65	3,36	130
RoTA	11,6	8,49	130
JumlStruktur	4,92	5,80	130

Sumber: Data sekunder yang diolah Achjari & Suryaningsum (2011)

Dari tabel statistik deskriptif untuk perusahaan-perusahaan sector industry telekomunikasi dan teknologi di Malaysia dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 sd 2007 ada 192 perusahaan Malaysia (nama-nama perusahaan sampel ini ada dalam lampiran). Tidak semua perusahaan yang didapat dalam sampel ini kemudian diolah, karena tergantung dari jumlah kelengkapan data yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Indikator-indikator non-finansial yaitu kualitas laporan keuangan, independensi

kepemilikan, jumlah struktur GCG memiliki nilai di atas rata-rata ketiga negara. Hanya indicator non-keuangan yaitu aksi perusahaan yang memiliki nilai di bawah negara Indonesia. Indikator keuangan yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan return dari pemanfaatan asset memiliki nilai yang sangat tinggi di atas rata-rata ketiga negara.

Tabel berikut ini adalah hasil olah regresi untuk perusahaan-perusahaan sector industry telekomunikasi dan teknologi di Malaysia.

Tabel 2b: Hasil olah regresi perusahaan teknologi dan telekomunikasi negara Malaysia

Variabel	Ringkasan Model		ANOVA		Koefisien			
	Adj. R ²	Stand Err of the est.	F	Sig	B	Std.Error	T	Sig
Lababersih	0,530	0,560	30,09	0,00	3,42	0,63	5,35	0,00
AksiPersh					0,07	0,00	8,41	0,00
KualitasLap					-0,49	0,14	-3,35	0,00
Independensi					0,00	0,01	0,02	0,98
RoTA					0,04	0,00	8,05	0,00
JumlStruktur					0,10	0,05	1,95	0,05

Sumber: Data sekunder yang diolah Achjari & Suryaningsum (2011)

Ada lima variabel independen sebagai implementasi good corporate governance yang diduga mempengaruhi capaian laba bersih perusahaan teknologi dan telekomunikasi di Malaysia. Hasil olah regresi adalah sebagai berikut. Tiga variabel secara signifikan mempengaruhi capaian laba bersih perusahaan teknologi dan telekomunikasi. Sedangkan variabel indikator independensi kepemilikan dan jumlah struktur organisasi sebagai kelengkapan penyelenggaraan GCG tidak mempengaruhi laba bersih. Persamaan yang dapat diturunkan dari hasil olah regresi adalah sebagai berikut:

$$\text{Laba Bersih Malaysia} = 3,421 + 0,078 \text{ Aksi Perusahaan} - 0,496 \text{ Kualitas Laporan Auditan} + 0,0 \text{ Independensi kepemilikan} + 0,048 \text{ Return atas aset total} + 0,103 \text{ Jumlah Struktur Organisasi GCG}$$

Dari tiga faktor yang mempengaruhi laba bersih pada tahun 2005-2007, ada dua faktor yang berpengaruh positif dan satu faktor yang berpengaruh negatif (nilai t lebih dari 2 dan

signifikansi kurang dari 0,05). Faktor yang berpengaruh positif adalah aksi perusahaan dan return on total aset. Sedangkan faktor yang berpengaruh signifikan negatif adalah kualitas laporan auditan. Penjelasan yang bisa diberikan berdasarkan data yang ada adalah data kualitas laporan audit di Malaysia memiliki nilai 0 sebanyak tujuh data, nilai 1 sebanyak 2 data, nilai 3 sebanyak 1 data, dan sisanya sebanyak 182 data adalah bernilai 4. Nilai 4 ini dominan, sementara laba yang ada pada data adalah berpola random, keberadaan data laba cukup bervariasi dari yang memiliki laba yang tinggi, sedang, maupun rendah cukup bervariasi. Hal inilah yang bisa jadi menyebabkan pengujian empiris menghasilkan kondisi yang secara statistika kualitas laporan auditan berpengaruh secara signifikan tapi negatif terhadap laba bersih.

Return of total asset merupakan cerminan dari aktivitas total aset dalam menghasilkan return. Untuk Malaysia, *return of total asset* mempengaruhi 0,048 laba bersih perusahaan teknologi dan telekomunikasi, yang berarti juga investasi dalam bentuk aset (dalam hal ini aset total) merupakan faktor yang penting dan signifikan dalam pembentukan laba bersih.

Indonesia

Perusahaan teknologi dan telekomunikasi Indonesia tahun 2005-2007 diperoleh rata-rata aksi perusahaan sebesar 16,71. Angka tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam. Lebih lanjut, variabel kualitas laporan keuangan auditan mengindikasikan rata-rata sebesar 3,88, dengan deviasi standar 0,612. Hal ini berarti hampir semua mendekati nilai wajar tanpa syarat.

Variabel independensi kepemilikan publik di Indonesia adalah sebesar 3,13 yang berarti berkisar antara nilai 3 dan 4. Nilai 3 setara dengan nilai C- dan nilai 4 setara dengan nilai C dalam indikator independensi kepemilikan publik oleh BvDEP. Nilai rata-rata independensi kepemilikan publik Indonesia ini sangat kecil jika dibandingkan rata-rata independensi kepemilikan publik untuk Malaysia.

Sementara itu variabel return atas aset total Indonesia adalah 6,6038. Nilai tersebut jika

dibandingkan dengan Malaysia adalah lebih kecil. Sedangkan untuk variabel jumlah struktur organisasi Indonesia rata-ratanya sebesar 1. Jika dibandingkan dengan jumlah struktur organisasi Malaysia, nilai tersebut adalah lebih rendah. Yang perlu dicatat untuk jumlah struktur organisasi sebagai kelengkapan unsur GCG pada perusahaan teknologi dan telekomunikasi di Indonesia ini, deviasi standarnya adalah 0,00. Hal ini berarti seluruh perusahaan teknologi dan telekomunikasi di Indonesia memiliki struktur organisasi GCG hanya 1. Karena itu variabel struktur organisasi menjadi terhapus dalam pengolahan regresinya, karena semuanya bernilai 1 dan tidak mempunyai deviasi standar. Ringkasan hasil statistika termasuk untuk koefisien regresi pada negara Indonesia dari olah data, tersaji dalam lampiran Tabel 3.

Tabel 3a: Statistik Deskriptif Perusahaan Teknologi dan Komunikasi Indonesia

Variabel	Statsitika Deskriptif		
	Rata-rata	Std. Dev.	N
Lababersih (konstansta)	3,55	1,34	24
AksiPersh	16,71	7,51	24
KualitasLap	3,88	0,61	24
Independensi	3,13	3,28	24
RoTA	6,63	7,55	24
JumlStruktur	1	0,00	24

Sumber: Data sekunder yang diolah Achjari & Suryaningsum (2011)

Dari tabel statistik deskriptif untuk perusahaan-perusahaan sector industry telekomunikasi dan teknologi di Indonesia dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 sd 2007 hanya ada tiga puluh delapan perusahaan Indonesia yang termasuk sampel (nama-nama perusahaan sampel ini ada dalam lampiran). Tidak semua perusahaan yang didapat dalam sampel ini kemudian diolah, karena tergantung dari jumlah kelengkapan data yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Indikator jumlah struktur GCG belum bagus karena belum dilaksanakan dengan baik hal ini Nampak pada deviasi standar yang bernilai 0,00 yang berarti tiga puluh delapan perusahaan terselama tahun 2005 sd 2007 kondisinya sama. Indikator ini selanjutnya akan tidak punya arti ketika dilakukan analisis regresi.

Tabel berikut ini (Tabel 3b) adalah hasil olah regresi untuk perusahaan-perusahaan sector industry telekomunikasi dan teknologi di Indonesia. Untuk kasus Indonesia, hanya empat variabel independen yang diolah dengan regresi, karena variabel struktur organisasi GCG terhapus seperti yang dijelaskan di atas. Empat variabel independen yang diolah yaitu aksi perusahaan, kualitas laporan auditan, independensi kepemilikan, dan return atas aset total terhadap laba bersih menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,706. Hasil uji ANOVA menghasilkan F hitung sebesar 14,781 dengan signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05) yang menunjukkan bahwa model regresi dengan melibatkan variabel-variabel aksi perusahaan, kualitas laporan auditan, independensi kepemilikan, dan return atas aset total GCG mempengaruhi laba bersih.

Hasil persamaan yang dapat diturunkan dari hasil olah regresi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Laba Bersih Indonesia} = & 4,632 - 0,059 \text{ Aksi} \\ & \text{Perusahaan} - 0,339 \text{ Kualitas} \\ & \text{Laporan Auditan} + 0,394 \\ & \text{Independensi kepemilikan} - \\ & 0,001 \text{ Return atas aset total} \end{aligned}$$

Hasil regresi data Indonesia menunjukkan variabel independensi kepemilikan publik dan variabel aksi perusahaan mempengaruhi capaian laba bersih perusahaan teknologi dan telekomunikasi di Indonesia. Sedangkan kualitas laporan auditan dan return atas aset total tidak terbukti mempengaruhi laba bersih.

Tabel 3b: Hasil Olah Regresi Perusahaan Teknologi dan Komunikasi Indonesia

Variabel	Ringkasan Model		ANOVA		Koefisien			
	Adj. R ²	Stand. Error	F	Sig	B	Std.Error	T	Sig
Lababersih	0,70	0,72	14,78	0,0	4,63	1,03	4,47	0,000
AksiPersh					-0,05	0,02	-2,35	0,030
KualitasLap					-0,33	0,24	-1,36	0,190
Independensi					0,39	0,08	4,92	0,000
RoTA					-0,001	0,03	-0,04	0,966
JumlStruktur					-	-	-	-

Sumber: Data sekunder yang diolah Achjari & Suryaningsum (2011)

Vietnam

Perusahaan teknologi dan telekomunikasi Vietnam tahun 2005-2007 memperlihatkan rata-rata aksi perusahaan sebesar 1,84. Jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN secara keseluruhan (lihat Tabel 1) angka tersebut jauh lebih kecil daripada rata-rata aksi perusahaan kawasan ASEAN yang besarnya adalah 11,39. Sedangkan variabel kualitas laporan keuangan auditan menunjukkan rata-rata sebesar 3,68. Angka ini lebih kecil dibandingkan dengan kawasan ASEAN secara keseluruhan besarnya adalah 3,91.

Nilai independensi kepemilikan publik adalah 1 karena indikator independensi yang diberikan oleh BvDEP adalah U yang berarti tidak diketahui. Nilai rata-rata independensi kepemilikan publik Vietnam ini kecil sekali jika dibandingkan rata-rata

independensi kepemilikan publik untuk seluruh kawasan ASEAN yaitu sebesar 6,45. Nilai independensi kepemilikan publik Vietnam ini terhapus dari olah data karena deviasi standarnya adalah 0 yang berarti keseluruhan perusahaan teknologi dan telekomunikasi di Vietnam tidak menjadi hal yang penting untuk diungkapkan pada publik. Selanjutnya, hasil olah data untuk variabel return atas aset total adalah 12,888. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan kawasan ASEAN secara keseluruhan yaitu 11,526. Sebagai tambahan, untuk variabel jumlah struktur organisasi Vietnam rata-ratanya sebesar 2,05. Jika dibandingkan dengan jumlah struktur organisasi kawasan ASEAN secara keseluruhan, angka ini lebih rendah (nilainya adalah sebesar 3,90).

Tabel 4a: Data Statistik Deskriptif Vietnam

Variabel	Statistika Deskriptif		
	Rata-rata	Std. Dev.	N
Lababersih	2,90	0,75	19
AksiPersh	1,84	2,00	19
JumlStruktur	2,05	1,17	19
KualitasLap	3,68	0,74	19
RoTA	12,88	5,41	19
Independensi	1	0,00	19

Sumber: Data sekunder yang diolah Achjari & Suryaningsum (2011)

Dari lima variabel independen, hanya empat variabel yang akan diolah secara regresi yaitu aksi perusahaan, jumlah pengurus GCG dalam struktur organisasi, kualitas atas laporan keuangan yang diaudit, dan return atas total aset, sedangkan variabel independensi kepemilikan publik terhapus.

Dari tabel statistik deskriptif untuk perusahaan-perusahaan sector industry telekomunikasi dan teknologi di Vietnam dapat diketahui bahwa pada tahun 2005 sd 2007 hanya ada dua puluh empat perusahaan Vietnam yang termasuk dalam sampel (nama-nama perusahaan sampel ini ada dalam lampiran). Tidak semua perusahaan yang didapat dalam sampel ini kemudian diolah, karena

tergantung dari jumlah kelengkapan data yang disajikan oleh perusahaan tersebut. Indikator jumlah struktur GCG di Vietnam sudah dilaksanakan dengan baik daripada di Indonesia pada tahun 2005 sd 2007. Hanya saja indicator independensi kepemilikan yang tidak dapat diobservasi lebih lanjut karena nampak pada deviasi standar yang bernilai 0,00 yang berarti perusahaan-perusahaan tersebut selama tahun 2005 sd 2007 kondisinya sama. Indikator ini selanjutnya akan tidak punya arti ketika dilakukan analisis regresi.

Tabel berikut ini (4b) adalah hasil olah regresi untuk perusahaan-perusahaan sector industry telekomunikasi dan teknologi di Vietnam.

Tabel 4b: Hasil Olah Regresi Perusahaan Teknologi dan Telekomunikasi Vietnam

Variabel	Ringkasan Model		ANOVA		Koefisien			
	Adj. R ²	Stand Err of the est.	F	Sig	Koef.Unstand.		T	Sig
					B	Std.Error		
Lababersih	0,912	0,225	47,35	0,00	1,899	0,27	7,02	0,00
AksiPersh					-0,259	0,02	-9,21	0,00
JumlStruktur					0,469	0,05	8,93	0,00
KualitasLap					0,028	0,08	0,34	0,73
RoTA					0,033	0,01	2,97	0,01
Independensi					-	-	-	-

Sumber: Data sekunder yang diolah Achjari & Suryaningsum (2011)

Hasil regresi untuk empat variabel independen yaitu aksi perusahaan, jumlah pengurus GCG dalam struktur organisasi, kualitas atas laporan keuangan yang diaudit, dan return atas total aset terhadap laba bersih menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,912. Hasil uji ANOVA menghasilkan F hitung sebesar 47,35 dengan signifikansi 0,000 (kurang dari 0,05) menunjukkan bahwa model regresi dengan melibatkan variabel-variabel aksi perusahaan, kualitas laporan auditan, return atas aset total, dan jumlah pengurus GCG dalam struktur organisasi mempengaruhi laba bersih. Persamaan yang dapat diturunkan dari hasil olah regresi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Laba Bersih Vietnam} = & 1,899 - 0,259 \text{ Aksi Perusahaan} \\ & + 0,028 \text{ Kualitas Laporan} \\ & \text{Auditan} + 0,033 \text{ Return atas} \\ & \text{aset total} + 0,469 \text{ Jumlah} \\ & \text{Pengurus GCG dalam} \\ & \text{Struktur Organisasi} \end{aligned}$$

Hasil olah regresi dari empat variabel independen yaitu aksi perusahaan, jumlah pengurus GCG dalam struktur organisasi, kualitas atas laporan keuangan yang diaudit, dan return atas total aset terhadap laba bersih menunjukkan hanya variabel kualitas atas laporan keuangan yang tidak berpengaruh signifikan.

Diskusi

Hasil ringkasan seluruh pengujian atas variabel-variabel indicator non-keuangan yang mencakupi aksi perusahaan, kualitas laporan keuangan, independensi kepemilikan publik, jumlah struktur GCG, dan variabel indicator keuangan yaitu return on total aset untuk negara Malaysia, Indonesia, dan Vietnam adalah sebagai berikut:

Tabel 5: Hasil Ringkasan Analisis

Lokasi	Indikator Non Keuangan			Indikator Keuangan	
	Aksi Perush	Kualitas Lap. Keu	Independ. Kepemilikan	Jumlah Struktur GCG	ROA
Malaysia	√	√	-	-	√
Indonesia	√	-	√	■	-
Vietnam	√	-	■	√	√

Sumber: Data sekunder yang diolah Achjari & Suryaningsum (2011)

√ = berpengaruh

■ = terhapus karena deviasi standar 0,00 yang mencerminkan besaran keseluruhan data bernilai satu angka

Relatif berimbang jumlah perusahaan teknologi dan telekomunikasi di negara Indonesia dan negara Vietnam menandakan suatu kemiripan kebijakan yang hampir serupa di dua negara tersebut dalam hal memacu dan menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan teknologi dan telekomunikasi sehingga secara statistik tidak ada perbedaan karakteristik negara di dua negara tersebut. Dugaan di atas menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan lingkup geografi penelitian yang lebih luas dan cenderung lebih maju, misalnya ASEAN, Asia Timur (Korea, Jepang, Hong Kong, China, dan Taiwan). Penggunaan Asia Timur untuk membuktikan dugaan adanya persamaan atau perbedaan orientasi negara atas kemajuan teknologi dan telekomunikasi, walaupun sama-sama Asia.

Untuk variabel jumlah kelengkapan susunan pengurus GCG yang merupakan perbaikan berbagai proksi mengenai kelengkapan susunan GCG, Wedari (2004) melakukan penghitungan susunan pengurus GCG dengan proksi komite audit yang dinyatakan dengan ada atau tidak ada, Herawaty (2008) hanya menjustifikasi komisaris independen sebagai proksi pengurus GCG, sedangkan Nuryaman (2008) dan Wardhani (2008) menjustifikasi proporsi komisaris independen terhadap jumlah total komisaris perusahaan. Dalam penelitian ini, proksi pengurus GCG bukan hanya komisaris independen ataupun komite audit hal ini karena komisaris independen dan komite audit hanya bagian dari susunan pengurus GCG. Kelengkapan susunan pengurus GCG adalah komisaris independen, komite renumerasi, komite audit, komite letigimasi, komite compliance, komite mitigasi, dan sekretaris perusahaan. Memang pada awal adanya aturan mengenai GCG, Bapepam pada tahun 2001 mengeluarkan aturan mengenai susunan pengurus GCG minimal ada tiga yaitu komisaris independen, komite audit, dan sekretaris

perusahaan. Atas dasar itu, penelitian ini memperbaiki penelitian terdahulu dengan melakukan penghitungan secara total jumlah kelengkapan susunan pengurus GCG. Penghitungan secara total jumlah kelengkapan susunan pengurus GCG adalah lebih sesuai karena menunjukkan jumlah sebenarnya susunan pengurus GCG dan yang mana berupa angka riil (data rasio menunjukkan jumlah sesungguhnya). Namun demikian bila dikaitkan dengan efisiensi dari susunan keseluruhan dewan komisaris perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan penghitungan proporsional antara jumlah susunan pengurus GCG dengan jumlah total dewan direksi & komisaris.

Untuk kepemilikan bisa dikembangkan lebih lanjut berdasarkan tipe lokasi kepemilikan pemegang saham, yaitu dengan tipe domestik dan asing. Kepemilikan berdasarkan institusi bisa dieksplor lebih lanjut berdasarkan institusi publik (pemerintah), institusi privat, ataupun institusi swasta (perusahaan manufaktur, bank, institusi dana pensiun, institusi keuangan). Hal ini akan menambah pemahaman lebih mendalam mengenai struktur kepemilikan.

SIMPULAN

Secara umum, hasil analisis pengujian untuk tiap negara menunjukkan hasil yang bervariasi. Hasil pengujian regresi atas Malaysia menunjukkan ada tiga variabel yang signifikan mempengaruhi capaian laba bersih perusahaan teknologi dan telekomunikasi, yaitu aksi perusahaan, return on total aset, dan kualitas laporan audit.

Untuk Indonesia, dan Vietnam masing-masing memiliki satu variabel yang terhapus dari lima variabel independen karena deviasi

standarnya 0,00 yang berarti nilai rata-ratanya mencerminkan hanya satu besaran angka dalam seluruh datanya.

Dalam hal Indonesia, hanya empat variabel independen yang diolah secara regresi, karena variabel struktur organisasi GCG terhapus. Hasil regresi untuk Indonesia, hanya dua variabel yaitu variabel independensi kepemilikan publik dan variabel aksi perusahaan yang signifikan mempengaruhi capaian laba bersih perusahaan teknologi dan telekomunikasi di Indonesia. Sementara itu, hasil regresi Vietnam menunjukkan variabel yang mempengaruhi capaian laba bersih perusahaan teknologi dan telekomunikasi adalah aksi perusahaan, jumlah pengurus GCG dalam struktur organisasi, dan return atas total aset.

SARAN

1. Penelitian ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan lingkup geografi penelitian yang lebih luas dan cenderung lebih maju, misalnya ASEAN, Asia Timur (Korea, Jepang, Hong Kong, China, dan Taiwan). Penggunaan Asia Timur untuk membuktikan dugaan adanya persamaan atau perbedaan orientasi negara atas kemajuan teknologi dan telekomunikasi, walaupun sama-sama Asia.
2. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan penghitungan proporsional antara jumlah susunan pengurus GCG dengan jumlah total dewan direksi & komisaris untuk mengetahui efisiensi dari susunan keseluruhan dewan komisaris.
3. Untuk kepemilikan bisa dikembangkan lebih lanjut berdasarkan tipe lokasi kepemilikan pemegang saham, yaitu dengan tipe domestik dan asing. Kepemilikan berdasarkan institusi bisa dieksplor lebih lanjut berdasarkan institusi publik (pemerintah), institusi privat, ataupun institusi swasta (perusahaan manufaktur, bank, institusi dana pensiun, institusi keuangan). Hal ini akan menambah pemahaman lebih mendalam mengenai struktur kepemilikan.

DAFTAR PUSTAKA

Achjari, Didi dan Suryaningsum, Sri. 2008. "Kinerja keuangan Perusahaan Teknologi dan Telekomunikasi: Komparasi Empiris Antar Negara-Negara ASEAN". *JAAI*. Vol. 12 No.2.

Achjari, Didi. Suryaningsum, Sri. Sari, Ratna Candra. 2009. "Implementation of Good Corporate Governance and Financial Performance." *The Indonesian Journal of Accounting Research*. Vol 12.,No. 3, September 2009: 215-232

Bureau van Dijk Electronic Publishing. 2003. "OSIRIS Data Guide". [www. bvdep.com](http://www.bvdep.com). [diakses 17 November 2008]

Carslaw, C.A.P.N., and Kaplan, S.E. 1991. "An Examination of Audit Delay: Further Evidence from New Zealand". *Accounting and Business Research*. Vol.22 (82), (Winter): pp:21-32.

Claessens, Stijin; Djankov, Simeon; Fan, Joseph; dan Lang, Larry H.P. 1999. "Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asia." Policy Research Paper 2088. World Bank, Washington, DC.

Claessens, Stijin; Djankov, Simeon; dan Lang, Larry H.P. 2000. "The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations." *Journal of Financial Economics*. Vol. 58: 81-112.

Claessens, Stijin; Djankov, Simeon; Fan, Joseph P.H.; dan Lang, Larry H.P. 2002. "Disentangling the Incentive and Entrenchment Effects of Large Shareholdings." *Journal of Finance*. Vol. 57, No. 6: 2741-1771.

Dipiazza, Samuel A. And Eccles, Robert G. 2002. *Building Public Trust: The Future of Corporate Reporting*. New York: John Wiley & Sons, Inc.

Herawaty, Vinola. 2008. "Peran Praktek Corporate Governance Sebagai Moderating Variable Dari Pengaruh Earnings Management Terhadap Nilai Perusahaan." *Prosiding SNA 11 Pontianak*.

Jensen, Michael C. dan Meckling, William H. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs. And Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*. Vol. 3: 305-360.

La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei.1999. "Corporate Ownership Around the World." *Journal of Finance*. Vol. 54, No. 2: 471-517.

La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei; dan Vishny, Robert 1998. "Law dan

- Finance." *Journal of Political Economy*. No. 106: 1113-1155.
- La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei; dan Vishny, Robert. 2000. "Agency Problems and Dividend Policies Around the World." *Journal of Finance*. Vol. 55: 1-33.
- La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei; dan Vishny, Robert. 2002. "Investor Protection and Corporate Valuation." *Journal of Finance*. Vol. 57, No. 3: 3-27.
- Midiastuty, Pratana Puspa dan Machfoedz, Mas'ud. 2003. "Analisa Hubungan Mekanisme Corporate Governanace dan Indikasi Manajemen Laba." *Simposium Nasional Akuntansi VI. IAI, 2003*.
- Morck, Randall; Wolfenzon, Daniel; dan Yeung, Bernard. 2004. "Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth." NBER Working Paper No. 10692.
- Nuryaman. 2008. Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, Dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan Sukarela. Prosiding The 2nd Accounting Conference And The 1st Doctoral Colloquium. Universitas Indonesia.
- Shleifer, A dan R.W. Vishny. 1997. "A Survey of Corporate Governance." *Journal of Finance*. Vol 52. No.2 Juni. 737-783.
- Siregar, Baldric. 2008. "Ekspropriasi Pemegang Saham Minoritas Dalam Struktur Kepemilikan Ultimat." *Prosiding SNA 11 Pontianak*.
- Siregar, Sylvia Veronica N.P. dan Utama, Siddharta. 2006. "Pengaruh Struktur Kepemilikan, Ukuran Perusahaan, dan Praktek Corporate Governance terhadap Pengelolaan Laba (Earnings Management), " *Journal Riset Akuntansi Indonesia Vol 9 No.3. Hal 307-326*
- Wedari, L.K.(2004). "Analisis Pengaruh Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit Terhadap Aktivitas Manajemen Laba." *Prosiding SNA VII. Denpasar. 963-974*